

PENGARUH JUMLAH PENDUDUK, DANA BAGI HASIL, DAN TOTAL BELANJA DAERAH TERHADAP INDEKS KESULITAN SOSIAL DI KOTA PEKANBARU**M. HAMID¹**

Universitas Riau

Email: muhammadhamidnasution@gmail.com**NURFITRIANI²**

Universitas Riau

Email: nurfitriani@lecturer.unri.ac.id**RARA SILKFAN³**

Universitas Riau

Email: rara.silkfan@lecturer.unri.ac.id**RAJA MULTI KONVOKESAN ADIMAN⁴**

Universitas Riau

Email: rajamulti58@gmail.com**ABSTRACT**

This study aims to analyze the effect of population, Revenue Sharing Fund (DBH), and total regional expenditure on the Social Difficulty Index (IKS) in Pekanbaru City during 2015–2023. Using an explanatory quantitative approach and multiple linear regression, the results show that partially, the population and total regional expenditure have a significant negative effect on the IKS, while DBH has a negative but insignificant effect. Simultaneously, these three variables explain 91% of the variation in IKS. These findings confirm that effective regional expenditure expansion and population growth accompanied by strong economic growth can reduce social difficulties, whereas optimization of DBH utilization still requires improvement.

Keywords: *Social Difficulty Index, Population, Revenue Sharing Fund, Regional Expenditure*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pengaruh jumlah penduduk, Dana Bagi Hasil (DBH), dan total belanja daerah terhadap Indeks Kesulitan Sosial (IKS) di Kota Pekanbaru periode 2015–2023. Melalui pendekatan kuantitatif eksplanatori dan regresi linear berganda, hasil menunjukkan bahwa secara parsial, jumlah penduduk dan total belanja daerah berpengaruh negatif signifikan terhadap IKS, sedangkan DBH berpengaruh negatif tetapi tidak signifikan. Secara simultan, ketiga variabel tersebut mampu menjelaskan 91% variasi IKS. Temuan ini menegaskan bahwa ekspansi belanja daerah yang efektif dan pertumbuhan penduduk yang disertai pertumbuhan ekonomi yang tinggi mampu menurunkan tingkat kesulitan sosial, sementara optimalisasi penggunaan DBH masih perlu ditingkatkan.

Kata Kunci: *Indeks Kesulitan Sosial, Jumlah Penduduk, Dana Bagi Hasil, Belanja Daerah*

1. PENDAHULUAN

Kota Pekanbaru merupakan salah satu pusat pertumbuhan ekonomi di Pulau Sumatra, namun pertumbuhan ekonomi yang tinggi belum sepenuhnya menjamin penurunan masalah sosial di masyarakat. Permasalahan sosial seperti kemiskinan, ketimpangan akses layanan pendidikan dan kesehatan, pengangguran terselubung, dan fenomena urbanisasi yang tidak merata masih menjadi tantangan nyata. Secara nasional, isu kemiskinan dan ketimpangan sosial menjadi kekhawatiran utama publik – tercatat 31% masyarakat Indonesia pada 2022 menyatakan khawatir terhadap kemiskinan dan ketimpangan tersebut. Meskipun persentase penduduk miskin di Kota Pekanbaru termasuk salah satu yang terendah di Indonesia (sekitar 3,15% pada 2024, turun dari 3,27% satu dekade sebelumnya), keberadaan kantong-kantong kemiskinan perkotaan dan keterbatasan akses sebagian kelompok masyarakat terhadap pelayanan dasar menunjukkan bahwa Indeks Kesulitan Sosial (IKS) masih relevan untuk diukur dan diturunkan.

Indeks Kesulitan Sosial (IKS) dalam penelitian ini mengacu pada suatu indikator komposit yang mencerminkan tingkat kerentanan dan permasalahan sosial di masyarakat, mencakup dimensi seperti kemiskinan, keterbatasan akses pendidikan, kesehatan, perumahan layak, dan masalah kesejahteraan sosial lainnya. Semakin tinggi nilai indeks ini, mengindikasikan semakin berat kondisi permasalahan sosial yang dihadapi. IKS berkaitan erat dengan konsep *social vulnerability* atau kerawanan sosial, di mana pertumbuhan penduduk tanpa diimbangi peningkatan kesejahteraan dapat memperberat tekanan pada infrastruktur dan layanan publik.

Indonesia memiliki jumlah populasi keempat terbesar di dunia, yang di satu sisi merupakan potensi sumber daya manusia, namun di sisi lain menjadi tantangan besar bagi pemerintah dalam meningkatkan kualitas hidup penduduk. Pertumbuhan penduduk yang cepat dapat menimbulkan tekanan pada penyediaan pendidikan, kesehatan, perumahan, dan lapangan kerja. Apabila laju pertumbuhan penduduk tidak dikelola dengan baik, dikhawatirkan akan terjadi ledakan penduduk yang justru memperburuk kemiskinan dan masalah sosial.

Hamid-Nurfitriani-Silkfan-Adiman, Pengaruh Jumlah Penduduk, Dana Bagi Hasil, Dan Total Belanja Daerah Terhadap Indeks Kesulitan Sosial Di Kota Pekanbaru

Studi empiris di berbagai daerah menunjukkan korelasi positif antara pertumbuhan penduduk dengan tingkat kemiskinan atau kerentanan sosial (Agustina et al., 2018; Chariza & Yefriza, 2025). Agustina et al. (2018) menemukan bahwa jumlah penduduk berpengaruh signifikan meningkatkan tingkat kemiskinan di Provinsi Aceh. Demikian pula, penelitian panel di Provinsi Bengkulu oleh Chariza & Yefriza (2025) menunjukkan laju pertumbuhan penduduk memiliki hubungan positif dengan kenaikan angka kemiskinan. Pandangan klasik teori Malthusian menyebut bahwa pertumbuhan penduduk yang melampaui pertumbuhan ekonomi akan menimbulkan *population-induced poverty trap*, dimana keluarga dan komunitas terjebak dalam kemiskinan karena pendapatan per kapita tergerus. Bahkan PBB melalui UNFPA menegaskan bahwa dinamika kependudukan berpengaruh besar terhadap prospek pengentasan kemiskinan dan pembangunan berkelanjutan. Oleh karena itu, hipotesis awal yang lazim adalah semakin besar jumlah penduduk, semakin tinggi Indeks Kesulitan Sosial, ceteris paribus.

Di sisi lain, pemerintah memiliki peran strategis melalui kebijakan fiskal untuk mengatasi *problem* sosial tersebut. Pemerintah Kota Pekanbaru menerima alokasi Dana Bagi Hasil (DBH) dan transfer pusat lainnya sebagai bagian dari implementasi desentralisasi fiskal. Dana Bagi Hasil (DBH) adalah dana transfer dari pemerintah pusat kepada daerah yang bersumber dari persentase penerimaan pajak maupun sumber daya alam tertentu, sesuai ketentuan perimbangan keuangan pusat-daerah. Tujuan DBH adalah meningkatkan kapasitas fiskal daerah, terutama daerah penghasil sumber daya, agar mampu menyediakan layanan publik dan kesejahteraan bagi masyarakat setempat.

Secara teoritis, desentralisasi fiskal dan transfer antar-pemerintah diharapkan dapat mendukung pengurangan kemiskinan dan meningkatkan pembangunan manusia dengan mendekatkan pengambilan keputusan ke tingkat lokal (Oates, 1972; Ali Khan, 2013). Ali Khan (2013) misalnya menyusun kerangka teoretis bahwa desentralisasi yang efektif membuka peluang pemerintah daerah lebih responsif dalam alokasi anggaran *pro-poor*. Dalam konteks Indonesia, transfer fiskal berperan sangat dominan karena sebagian besar pemerintah daerah sangat bergantung pada dana transfer dibanding Pendapatan Asli Daerah.

Penelitian Heru S. Putra (2017) dengan data panel nasional 2005–2013 menunjukkan bahwa kenaikan 10% alokasi transfer ke daerah rata-rata dapat menurunkan tingkat kemiskinan absolut sekitar 1,24%. Transfer fiskal juga berkontribusi menurunkan *poverty gap* dan *poverty severity* secara signifikan. Hal ini mengindikasikan bahwa peningkatan DBH semestinya berdampak pada penurunan Indeks Kesulitan Sosial, karena bertambahnya DBH memperkuat kapasitas APBD untuk program sosial.

Studi lain oleh Ina & Hudang (2024) mengenai Nusa Tenggara Timur menemukan bahwa DBH berpengaruh positif dan signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) – sebagai *proxy* kesejahteraan – artinya peningkatan DBH meningkatkan kualitas pembangunan manusia. Dengan kata lain, daerah yang menerima DBH lebih besar mampu menaikkan angka pendidikan, kesehatan, dan pendapatan masyarakatnya yang secara langsung menurunkan kesulitan sosial.

Senada dengan itu, Nurias et al. (2023) melaporkan bahwa belanja pemerintah yang didanai transfer pusat di sektor kesehatan dan pendidikan berhasil menurunkan tingkat kemiskinan di provinsi-provinsi Indonesia secara signifikan. Meskipun demikian, efektivitas DBH tidak otomatis terjamin Putra (2017) mencatat bahwa dampak Dana Alokasi Umum (DAU) yang merupakan transfer umum cenderung tidak berbeda jauh dengan Dana Alokasi Khusus (DAK) yang bersyarat dalam pengentasan kemiskinan, padahal secara teori seharusnya dana umum lebih fleksibel dan berdampak kuat. Temuan tersebut mengindikasikan kemungkinan inefisiensi atau penggunaan DBH yang belum sepenuhnya *pro-poor* di beberapa daerah. Bahkan, penelitian Williantara & Budiasih (2016) dikutip Ina & Hudang (2024) menemukan bahwa DBH, DAU, dan DAK secara simultan tidak berpengaruh signifikan terhadap IPM di kabupaten/kota Provinsi Bali. Oleh sebab itu, terdapat *gap* penelitian mengenai bagaimana DBH berdampak pada indikator sosial di berbagai konteks daerah. Di Kota Pekanbaru yang relatif maju dan berpendapatan tinggi (termasuk penerimaan DBH dari sektor migas di Provinsi Riau), perlu dikaji apakah DBH benar-benar membantu menurunkan IKS ataukah dampaknya minimal.

Selain transfer pusat, belanja pemerintah daerah itu sendiri merupakan instrumen kunci dalam menangani persoalan sosial. Total Belanja Daerah mencerminkan komitmen anggaran pemerintah untuk berbagai program pembangunan, termasuk di dalamnya belanja pada fungsi pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, infrastruktur dasar permukiman, pemberdayaan ekonomi rakyat, dan lain-lain.

Teori ekonomi publik (Musgrave, 1959) menempatkan fungsi alokasi dan distribusi sebagai peran pemerintah untuk menyediakan barang publik dan menjaga kesejahteraan masyarakat. Peningkatan belanja daerah di sektor-sektor sosial diperkirakan akan menurunkan tingkat kemiskinan dan kerawanan sosial, asalkan belanja tersebut efektif dan tepat sasaran. Banyak studi empiris mendukung hal ini: Firdaus & Beik (2013) menemukan belanja pemerintah daerah berpengaruh negatif terhadap kemiskinan dan pengangguran secara agregat di Indonesia. Anggraeni & Haryanto (2020) juga melaporkan belanja daerah bersama pertumbuhan ekonomi berkontribusi menurunkan tingkat kemiskinan nasional secara signifikan.

Temuan serupa pada level daerah perbatasan Kalimantan Barat oleh Anggun & Sari (2024) menunjukkan realisasi belanja APBD berhubungan negatif dan signifikan dengan jumlah penduduk miskin – peningkatan belanja terbukti menurunkan angka kemiskinan sebesar 0,000018 per satuan kenaikan belanja (dalam juta rupiah). Ini konsisten dengan penelitian Fadlillah et al. (2016) yang menemukan belanja pemerintah (melalui variabel PDRB per kapita sebagai *proxy* kapasitas belanja) berpengaruh negatif terhadap kemiskinan di Jawa Tengah. Meskipun beberapa studi lain menyebut bahwa efek belanja tidak selalu

signifikan apabila kualitas belanja rendah atau terjadi inefisiensi program, secara umum hipotesis yang dapat diajukan adalah semakin besar total belanja daerah, semakin rendah Indeks Kesulitan Sosial. Artinya, ekspansi anggaran pemerintah daerah – khususnya pada belanja sosial – diharapkan mampu mengurangi kesulitan sosial dengan meningkatkan pelayanan publik dan jaring pengaman sosial.

Berdasarkan latar belakang dan tinjauan teoritis/empiris di atas, dapat dirumuskan pertanyaan penelitian: Sejauh mana jumlah penduduk, Dana Bagi Hasil (DBH), dan total belanja daerah memengaruhi Indeks Kesulitan Sosial di Kota Pekanbaru? Penelitian ini penting dilakukan untuk mengisi kesenjangan literatur terkait efektivitas transfer fiskal dan belanja daerah dalam konteks kota besar yang relatif makmur namun masih memiliki tantangan sosial. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh jumlah penduduk, DBH, dan total belanja daerah terhadap Indeks Kesulitan Sosial Kota Pekanbaru periode 2015–2023, serta memberikan rekomendasi kebijakan berdasarkan temuan empiris. Dengan demikian, diharapkan hasil studi ini dapat memperkaya khazanah ilmu ekonomi publik dan pembangunan daerah, sekaligus memberikan masukan bagi pemerintah daerah dalam upaya menurunkan kesulitan sosial secara berkelanjutan.

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Indeks Kesulitan Sosial (IKS)

Indeks Kesulitan Sosial merupakan indikator komposit yang digunakan untuk mengukur tingkat kesulitan atau masalah sosial yang dihadapi masyarakat dalam suatu wilayah. Konsep ini sejalan dengan pengukuran *social hardship* atau *social vulnerability* yang mencakup berbagai dimensi kesejahteraan. Beberapa indikator yang umumnya membentuk IKS antara lain tingkat kemiskinan (persentase penduduk miskin), tingkat pengangguran dan setengah penganggur, angka ketimpangan (*Gini ratio*), serta akses terhadap layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, air bersih, dan perumahan layak. Semakin tinggi IKS, menunjukkan bahwa masyarakat wilayah tersebut menghadapi kombinasi permasalahan sosial yang lebih kompleks dan mendesak. Menurut Kementerian Sosial RI, berbagai Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) – seperti kemiskinan, ketunaan, *disabilitas* terlantar, anak jalanan, pengangguran, ketertinggalan pendidikan, kawasan kumuh – merupakan komponen permasalahan sosial yang perlu ditekan untuk meningkatkan *social well-being* (Kemensos, 2019).

Dalam konteks pembangunan, IKS dapat disejajarkan dengan upaya menurunkan kemiskinan multidimensi. Konsep *Multidimensional Poverty Index* (MPI) yang diperkenalkan UNDP mengukur kemiskinan tidak hanya dari sisi pendapatan, tetapi juga dari *deprivasi* di sektor pendidikan dan kesehatan. Demikian pula, IKS Pekanbaru dalam penelitian ini diharapkan mencerminkan situasi multidimensi tersebut. Sayangnya, literatur akademis mengenai IKS Pekanbaru secara spesifik masih jarang. Oleh karena itu, penulis merujuk pada indikator terkait, misalnya tingkat kemiskinan, untuk memahami tren IKS. Data BPS menunjukkan persentase kemiskinan di Pekanbaru relatif rendah (sekitar 3% pada 2020-an) namun sedikit meningkat saat pandemi COVID-19 sebelum turun kembali. Stabilitasnya angka kemiskinan di level rendah bisa jadi menutupi ketimpangan perkotaan dan masalah kantong kemiskinan di daerah tertentu. Karena itu, IKS sebagai indeks gabungan diperlukan agar kebijakan pemerintah tidak hanya fokus pada kemiskinan ekstrem, tetapi juga *deprivasi* relatif dan kerawanan sosial lain.

2.2 Jumlah Penduduk dan Permasalahan Sosial

Teori dan penelitian terdahulu banyak membahas hubungan antara dinamika penduduk dengan kondisi sosial ekonomi. Teori Malthus (1798) menyatakan bahwa pertumbuhan penduduk yang eksponensial cenderung melampaui pertumbuhan produksi pangan yang linear, sehingga tanpa kontrol akan terjadi kemiskinan massal. Meskipun teori klasik ini dikritik, data empiris memang menunjukkan di banyak negara berkembang, laju pertumbuhan penduduk berkorelasi positif dengan tingkat kemiskinan. Hal ini karena kenaikan jumlah penduduk, khususnya dalam keluarga miskin, memperbesar beban tanggungan dan menurunkan pengeluaran per kapita.

Studi Fauzi et al. (2022) menemukan bahwa laju pertumbuhan penduduk berpengaruh positif signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia, artinya provinsi dengan pertumbuhan penduduk lebih tinggi cenderung memiliki kemiskinan lebih tinggi. Demikian pula, Berliani (2021) dalam Chariza & Yefriza, (2025) untuk Provinsi Jawa Barat, dan Agustina et al. (2018) untuk Provinsi Aceh, sama-sama mengonfirmasi bahwa faktor jumlah/pertumbuhan penduduk mempersulit penurunan kemiskinan. Penyebabnya antara lain: (1) Pertumbuhan penduduk meningkatkan tekanan terhadap fasilitas publik – misalnya sekolah dan puskesmas – sehingga kualitas layanan bisa menurun jika kapasitas tidak bertambah. (2) Angkatan kerja baru dari pertumbuhan penduduk tidak selalu terserap lapangan kerja formal, sehingga pengangguran terbuka maupun terselubung bertambah (Hasballah, 2021). (3) Migrasi urban ke kota seperti Pekanbaru dapat memicu munculnya kawasan kumuh baru dan persaingan memperebutkan lapangan usaha kecil, yang tanpa intervensi dapat meningkatkan fenomena pekerja miskin di sektor informal.

Di sisi lain, literatur juga mengakui bahwa *demographic dividend* (bonus demografi) dapat terjadi jika struktur penduduk didominasi usia produktif yang sehat dan terdidik, sehingga justru mendorong pertumbuhan ekonomi dan menurunkan kemiskinan (Bloom & Canning, 2004). Hal ini sejalan dengan teori Gary Becker yang menekankan kualitas SDM: keluarga cenderung memilih kualitas (pendidikan, kesehatan) anak dibanding kuantitas apabila mereka sejahtera, sehingga akhirnya pertumbuhan penduduk melambat dan investasi per anak meningkat. Penelitian global oleh Nabi et al. (2020) bahkan menemukan hubungan negatif

antara pertumbuhan populasi dan kemiskinan di beberapa ambang batas, yang penulis kaitkan dengan konteks negara-negara maju. Namun, dalam konteks negara berkembang dan kota berkembang seperti Pekanbaru, asumsi umum yang digunakan adalah tanpa kebijakan *kompensatoris*, peningkatan jumlah penduduk akan cenderung meningkatkan Indeks Kesulitan Sosial.

2.3 Dana Bagi Hasil (DBH)

DBH merupakan salah satu komponen dana perimbangan yang ditransfer pemerintah pusat ke pemerintah daerah. Menurut UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan, DBH terdiri dari DBH Pajak (seperti pajak penghasilan, PPN, PBB, dan BPHTB) dan DBH Sumber Daya Alam (seperti DBH Minyak Bumi, Gas Alam, Kehutanan, Pertambangan, Perikanan). Tujuan DBH adalah menyodorkan dana sesuai kontribusi wilayah: misalnya, daerah penghasil minyak mendapatkan sekian persen dari total penerimaan minyak nasional sebagai bagi hasil. Bagi Kota Pekanbaru yang merupakan ibukota Provinsi Riau, penerimaan DBH signifikan terutama dari sektor migas yang diolah di provinsi ini.

Secara teori, tambahan DBH meningkatkan *fiscal capacity* APBD sehingga daerah mampu membelanjakan lebih banyak untuk pelayanan publik dan program pengentasan masalah sosial. Sudhipongpracha & Wongpredee (2016) menyatakan bahwa *general purpose transfers* (seperti DAU di Indonesia) jika dirancang dengan baik dapat meningkatkan kapasitas fiskal daerah tertinggal. Penelitian Otong Suhyanto et al. (2021) di Provinsi Jawa Barat mendapati bahwa dana transfer terutama DAU memiliki pengaruh terbesar dalam meningkatkan kinerja pembangunan daerah, termasuk indikator kemiskinan dan Indeks Pembangunan Manusia. Bagaimanapun, efektivitas DBH bisa bervariasi tergantung prioritas belanja daerah.

Ina & Hudang (2024) yang meneliti kabupaten di NTT menemukan DBH berpengaruh positif signifikan terhadap IPM, menyiratkan bahwa daerah menggunakan DBH untuk meningkatkan sektor pendidikan, kesehatan, dll. Sebaliknya, studi Williantara & Budiasih (2016) tidak menemukan pengaruh signifikan DBH terhadap IPM di Bali, hal ini dikarenakan alokasi DBH di daerah tersebut tidak langsung menyentuh kebutuhan dasar masyarakat (misal lebih banyak untuk belanja administrasi daripada belanja publik).

Dari literatur tentang desentralisasi dan kemiskinan, Heru S. Putra (2017) menegaskan bahwa meski transfer antar pemerintah menurunkan kemiskinan, dana transfer umum (DAU) di Indonesia tampaknya belum seluruhnya *pro-poor*. DAU, sebagai padanan *block grant* tanpa ikatan, diharapkan teori Oates lebih efektif karena daerah bebas mengalokasikan sesuai kebutuhan lokal. Namun temuan Putra bahwa dampak DAU hanya sedikit lebih tinggi daripada DAK (dana khusus) menunjukkan peluang inefisiensi atau moral hazard di pihak daerah. Bisa jadi, DBH/DAU digunakan untuk proyek yang kurang bersentuhan dengan rakyat miskin (misal proyek mercusuar atau belanja pegawai berlebih), sehingga dampaknya ke penurunan kemiskinan minima. Meski begitu, hipotesis yang diuji dalam penelitian ini konsisten dengan kerangka pikir *fiscal decentralization*: semakin besar DBH yang diterima, semakin rendah Indeks Kesulitan Sosial, dengan catatan asumsi bahwa tambahan DBH dioptimalkan untuk program-program sosial daerah.

2.4 Total Belanja Daerah

Total belanja daerah mencerminkan kemampuan dan kebijakan fiskal pemerintah kota dalam membiayai pembangunan. Di dalam APBD, belanja daerah mencakup belanja operasional (belanja pegawai, barang/jasa), belanja modal (investasi infrastruktur, fasilitas publik), belanja tidak terduga, serta belanja transfer. Belanja yang efektif pada akhirnya diukur dari *output* dan *outcome* pembangunan yang dihasilkan. Teori Keynesian menyatakan pengeluaran pemerintah dapat meningkatkan pendapatan agregat dan kesejahteraan melalui efek pengganda. Sementara teori pembangunan manusia (UNDP) menekankan bahwa belanja publik di sektor pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial adalah investasi langsung pada peningkatan kualitas hidup penduduk.

Halim, Rahayu & Muzdalifah (2022) menemukan bahwa belanja pemerintah daerah pada fungsi kesehatan, perumahan, dan infrastruktur berpengaruh signifikan meningkatkan IPM (Indeks Pembangunan Manusia) di Indonesia. Ini berarti belanja di bidang tersebut berhasil meningkatkan komponen kualitas hidup (umur harapan, pendidikan, standar hidup) yang terkait erat dengan penurunan kesulitan sosial. Menariknya, belanja fungsi pendidikan dalam studi tersebut tidak signifikan, diduga karena efeknya butuh waktu lebih panjang atau kualitas belanja yang belum optimal.

Nurias et al. (2023) juga menunjukkan bahwa belanja pemerintah di sektor kesehatan dan pendidikan berpengaruh signifikan menurunkan tingkat kemiskinan provinsi-provinsi di Indonesia. Sementara belanja perlindungan sosial (seperti bantuan sosial) kadang tidak signifikan jika anggarannya kecil atau tidak tepat sasaran. Dalam konteks Pekanbaru, belanja daerah per kapita cukup tinggi mengingat PAD dan transfer yang besar. Fokus belanja Pemerintah Kota Pekanbaru antara lain pada pembangunan infrastruktur perkotaan dan peningkatan layanan publik. Jika belanja tersebut tepat guna, seharusnya indikator sosial membaik. Namun, masalah efisiensi belanja perlu diperhatikan.

Studi Bappenas (Armas, 2019) mencatat banyak daerah dengan belanja tinggi tetapi angka kemiskinan turun lambat, menandakan perlunya perbaikan tata kelola anggaran. Secara empiris di Indonesia, Anggraeni & Haryanto (2020) menemukan belanja daerah berpengaruh negatif signifikan terhadap kemiskinan nasional. Fadlillah et al. (2016) juga melaporkan belanja publik (diwakili variabel belanja modal,

PDRB per kapita) menurunkan kemiskinan di Jawa Tengah. Sebaliknya, penelitian di Aceh oleh Darmawan (2020) yang justru menemukan belanja langsung daerah berkorelasi positif dengan kemiskinan, mengindikasikan inefektivitas (belanja modal tinggi tapi tidak dinikmati penduduk miskin). Meskipun demikian, hipotesis dalam studi ini tetap bahwa kenaikan total belanja APBD akan menurunkan Indeks Kesulitan Sosial, dengan asumsi belanja tersebut mengalir ke program-program yang meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan tinjauan pustaka di atas, dapat dirangkum bahwa penelitian sebelumnya umumnya mendukung: (1) jumlah penduduk berimplikasi memperburuk masalah sosial (indikator kemiskinan meningkat dengan penduduk, kecuali ada faktor pertumbuhan ekonomi yang mengimbangi), (2) dana transfer pusat (DBH, DAU, dll) berpotensi menurunkan kemiskinan/meningkatkan IPM, namun efektivitasnya bergantung kualitas belanja daerah, (3) belanja daerah terutama pada sektor sosial terbukti menurunkan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan di berbagai konteks. Oleh karena itu, penelitian ini akan menguji hubungan-hubungan tersebut secara kuantitatif untuk Kota Pekanbaru. Berikutnya dipaparkan metodologi yang digunakan.

2.5 Hipotesis

- H1 : Jumlah penduduk berpengaruh positif signifikan terhadap Indeks Kesulitan Sosial di Kota Pekanbaru.
H2 : Dana Bagi Hasil berpengaruh negatif signifikan terhadap Indeks Kesulitan Sosial di Kota Pekanbaru.
H3 : Total belanja daerah berpengaruh negatif signifikan terhadap Indeks Kesulitan Sosial di Kota Pekanbaru.

3. METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Jenis dan Desain Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif *eksplanatori* dengan desain regresi linear berganda. Desain ini dipilih karena data yang digunakan merupakan kombinasi runtut waktu (*time series*) tahun 2016–2024 di Kota Pekanbaru. Meskipun analisis berfokus pada satu kota, pendekatan data panel diterapkan dengan mempertimbangkan variasi antar indikator dan waktu secara simultan untuk meningkatkan jumlah observasi dan derajat kebebasan model.

3.2 Data dan Sumber Data

Penelitian menggunakan data sekunder dari instansi resmi. Data Indeks Kesulitan Sosial (IKS) Kota Pekanbaru tahun 2016–2024 diperoleh dari publikasi Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Pekanbaru, seperti *Pekanbaru dalam Angka* dan publikasi statistik sektoral terkait kesejahteraan rakyat. IKS dihitung penulis berdasarkan indikator sosial yang tersedia (misal persentase penduduk miskin, rasio gini, tingkat pengangguran) menggunakan metode penskoran yang distandarkan; definisi detail IKS dijelaskan pada bagian sebelumnya. Jumlah penduduk (dalam jiwa) tiap tahun diambil dari laporan BPS Pekanbaru (estimasi jumlah penduduk pertengahan tahun). Dana Bagi Hasil (DBH) (dalam rupiah) diperoleh dari Laporan Realisasi APBD Kota Pekanbaru, khususnya bagian pendapatan transfer (pos Dana Perimbangan – DBH Pajak dan DBH SDA). Total Belanja Daerah (dalam rupiah) diambil dari Laporan Realisasi APBD, yakni akumulasi belanja operasi, modal, tak terduga, dan transfer pemerintah Kota Pekanbaru tahun 2016–2024.

Sumber pendukung lain meliputi dokumen Kementerian Keuangan (DJPK) dan publikasi ilmiah untuk *cross-check* data. Seluruh data keuangan (DBH dan belanja) disajikan dalam nilai rupiah miliar agar memudahkan analisis (misal DBH dalam ratusan miliar Rp, belanja dalam triliun Rp). Populasi dinyatakan dalam satuan jiwa.

3.3 Variabel Penelitian

Terdapat satu variabel dependen dan tiga variabel independen dalam model. Variabel dependen adalah Indeks Kesulitan Sosial (IKS) (Y), berupa angka indeks (skala rasio) yang merepresentasikan tingkat kesulitan sosial; semakin tinggi nilai Y, kondisi sosial semakin buruk. Variabel independen meliputi: (X1) Jumlah Penduduk (JP, dalam jiwa), (X2) Dana Bagi Hasil (DBH) yang diterima daerah (dalam rupiah), dan (X3) Total Belanja Daerah (TB, dalam rupiah). Secara operasional, JP diukur dalam jutaan jiwa, DBH dalam ratusan miliar rupiah, dan TB dalam triliun rupiah untuk mempermudah interpretasi koefisien regresi.

3.4 Model Analisis

Model persamaan yang digunakan adalah regresi linear berganda berbasis data panel tahunan, secara matematis dituliskan sebagai berikut:

$$IKS_{it} = \beta_0 + \beta_1 JP_{it} + \beta_2 DBH_{it} + \beta_3 TB_{it} + \varepsilon_{it}$$

Dimana i merepresentasikan entitas (dalam hal ini hanya Kota Pekanbaru, sehingga model menyusut menjadi *time series*) dan t mewakili tahun (2015–2023). β_0 adalah konstanta, $\beta_1, \beta_2, \beta_3$, koefisien variabel independen, dan ε adalah *error term*. Karena data hanya satu kota, analisis setara regresi *time-series* ($T=9$).

3.5 Analisis Data

Estimasi parameter dilakukan dengan metode *Ordinary Least Squares* (OLS) menggunakan perangkat lunak SPSS 24. Mengingat jumlah observasi terbatas (9 tahun), signifikansi statistik ditetapkan

pada level $\alpha=5\%$ (dan $\alpha=10\%$ sebagai pertimbangan signifikansi marginal). Uji asumsi klasik meliputi: uji normalitas residual (*Kolmogorov-Smirnov*), uji multikolinearitas (VIF dan *tolerance*), uji heteroskedastisitas (inspeksi pola residual dan uji Breusch-Pagan), serta uji autokorelasi (Durbin-Watson test). Uji normalitas *Kolmogorov-Smirnov* menghasilkan nilai signifikansi 0,200 ($>0,05$), menunjukkan distribusi residual tidak berbeda signifikan dari normal (asumsi normalitas terpenuhi). Uji multikolinearitas menunjukkan nilai VIF tiap variabel X sekitar 1,4–1,7 (<10) dan *tolerance* $> 0,5$, sehingga tidak terdapat korelasi sempurna antar variabel independen. Statistik Durbin-Watson sekitar 1,725 mendekati 2, menandakan tidak ada autokorelasi positif serius (data tahunan cenderung bebas autokorelasi tinggi). Secara keseluruhan, model regresi memenuhi asumsi BLUE (*Best Linear Unbiased Estimator*) dengan batasan data yang ada.

Variabel dependen adalah Indeks Kesulitan Sosial (IKS), sementara variabel independen meliputi jumlah penduduk, Dana Bagi Hasil (DBH), dan total belanja daerah. Metode *Ordinary Least Squares* (OLS) dengan perangkat lunak SPSS versi 24 digunakan untuk estimasi parameter. Pengujian asumsi klasik mencakup uji normalitas (*Kolmogorov-Smirnov*), multikolinearitas (VIF dan *tolerance*), heteroskedastisitas (*scatterplot*), serta autokorelasi (Durbin-Watson). Signifikansi statistik ditetapkan pada level $\alpha=5\%$.

Pertama, data dianalisis secara deskriptif untuk memahami tren variabel tahun 2015–2023. Selanjutnya, dilakukan analisis korelasi Pearson antar variabel untuk melihat hubungan awal. Kemudian, model regresi diestimasi. Uji statistik meliputi: (1) Uji-F (simultan) untuk menguji apakah JP, DBH, dan TB secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap IKS; (2) Uji-t (parsial) untuk menguji signifikansi masing-masing koefisien variabel independen; (3) Koefisien Determinasi (*R-squared*) untuk melihat proporsi variasi IKS yang dapat dijelaskan model. Interpretasi hasil regresi dilakukan terhadap tanda koefisien (arah pengaruh) dan signifikansi, yang kemudian dibandingkan dengan hipotesis awal dan studi sebelumnya.

4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

1. Statistik Deskriptif

Tabel 4.1 Descriptive Statistics

	Mean	Std. Deviation	N
Indeks Kesulitan sosial	5,1672	0,64028	9
Jumlah Penduduk	1035236,0000	93628,00243	9
DBH (Rp)	236574333333,3330	43532823363,52650	9
Total Belanja Daerah	118562555555,5600	12638663963,32200	9

Sumber: Hasil Pengolahan SPSS Versi 24

Hasil statistik deskriptif menunjukkan bahwa rata-rata Indeks Kesulitan Sosial di Pekanbaru selama periode 2015–2023 adalah 5,17 dengan standar deviasi 0,64. Jumlah penduduk rata-rata mencapai 1.035.236 jiwa, sedangkan rata-rata Dana Bagi Hasil (DBH) yang diterima sebesar Rp236,57 miliar per tahun. Total belanja daerah setiap tahun rata-rata sebesar Rp1,19 triliun. Data ini mencerminkan kondisi sosial-ekonomi Pekanbaru yang cukup stabil dengan variasi tahunan yang masih dalam batas wajar.

2. Uji Asumsi Klasik

a. Uji Normalitas

Uji asumsi klasik dilakukan untuk memastikan kelayakan penggunaan model regresi, salah satunya dengan menguji apakah residual model terdistribusi normal. Pengujian normalitas residual dilakukan menggunakan *One-Sample Kolmogorov-Smirnov* (K-S) Test pada program SPSS versi 24.

Tabel 4.2 One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		9
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	0,0000000
	Std. Deviation	0,19261181
Most Extreme Differences	Absolute	0,141
	Positive	0,106
	Negative	-0,141
Test Statistic		0,141
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200 ^{c,d}

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

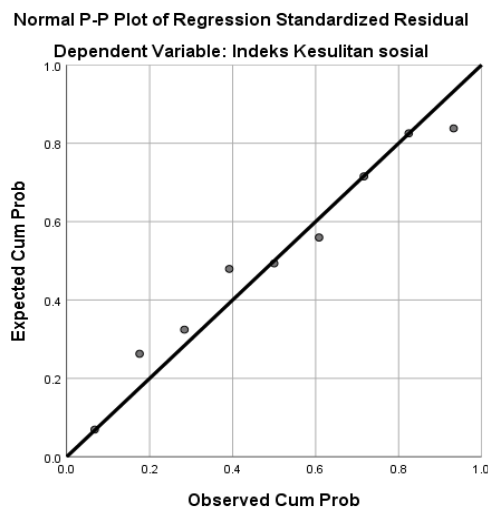
d. This is a lower bound of the true significance.

Sumber: Hasil Pengolahan SPSS Versi 24

Pada Tabel 4.2 dapat dilihat hasil uji normalitas *Kolmogorov-Smirnov Test* terhadap *unstandardized* residual dengan jumlah sampel (N) sebanyak 9. Nilai mean residual adalah 0,00000 dan standar deviasi 0,19261. Hasil uji menunjukkan nilai statistik K-S sebesar 0,141 dengan nilai signifikansi (Asymp. Sig. 2-tailed) sebesar 0,200. Nilai signifikansi ini lebih besar dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa residual

model regresi telah memenuhi asumsi normalitas (terdistribusi normal). Sebagai pelengkap, uji normalitas juga divisualisasikan dengan grafik Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual (Gambar 4.1).

Gambar 4.1 Grafik P-Plot



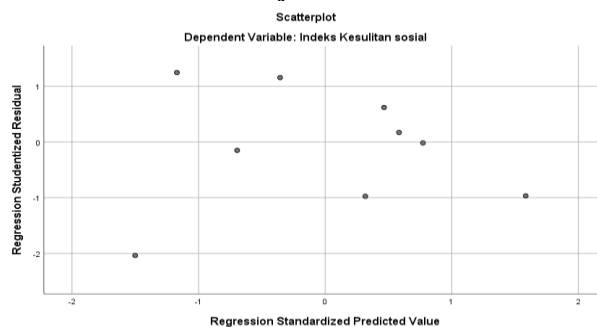
Sumber: Hasil Pengolahan SPSS Versi 24

Berdasarkan Ghozali (2018), data residual dikatakan terdistribusi normal apabila titik-titik pada grafik menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis tersebut. Pada grafik yang dihasilkan, terlihat bahwa sebagian besar titik berada di sekitar garis diagonal, sehingga menguatkan kesimpulan bahwa residual model memenuhi asumsi normalitas. Dengan demikian, model regresi layak digunakan untuk analisis lebih lanjut.

b. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varians residual dari satu pengamatan ke pengamatan lainnya. Salah satu cara yang umum digunakan untuk mendeteksi adanya heteroskedastisitas adalah dengan memperhatikan pola pada grafik *scatterplot* antara nilai residual yang telah distandarisi dengan nilai prediksi hasil regresi.

Gambar 4.2 Uji Heteroskedastisitas



Sumber: Hasil Pengolahan SPSS Versi 24

Pada Gambar 4.2 ditampilkan hasil uji heteroskedastisitas dengan *scatterplot*. Berdasarkan hasil pengolahan data, grafik *scatterplot* menunjukkan bahwa titik-titik residual menyebar secara acak di atas dan di bawah sumbu nol pada sumbu Y, tanpa membentuk pola tertentu seperti menggumpal di tengah, menyempit, atau melebar di salah satu sisi. Ketidakhadiran pola yang jelas ini mengindikasikan bahwa model regresi tidak mengandung gejala heteroskedastisitas. Dengan demikian, asumsi homoskedastisitas pada model telah terpenuhi, sehingga model layak digunakan untuk analisis lebih lanjut (Ghozali, 2018).

c. Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi dilakukan untuk menguji apakah terdapat korelasi antara kesalahan (residual) pada periode t dengan residual pada periode $t-1$ dalam model regresi linier. Model regresi yang baik adalah model yang bebas dari autokorelasi (Ghozali, 2018).

**Tabel 4.3 Uji Autokorelasi
Model Summary^b**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.954 ^a	0,910	0,855	0,24364	1,725

a. Predictors: (Constant), Total Belanja Daerah, DBH (Rp), Jumlah Penduduk

b. Dependent Variable: Indeks Kesulitan sosial

Sumber: Hasil Pengolahan SPSS Versi 24

Berdasarkan hasil output SPSS 24 pada tabel 4.4, nilai Durbin-Watson yang diperoleh adalah 1,725. dengan jumlah sampel sebanyak 9 dan tiga variabel independen, nilai *Durbin-Watson* tersebut berada di antara nilai batas bawah (dL) dan batas atas (dU) menurut tabel *Durbin-Watson*. Dalam kasus ini, jika nilai *Durbin-Watson* mendekati angka 2, maka model dapat dikatakan bebas dari autokorelasi. Nilai *Durbin-Watson* 1,725 ini berada dalam rentang yang tidak menunjukkan adanya korelasi positif maupun negatif antar residual. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa model regresi dalam penelitian ini bebas dari masalah autokorelasi, sehingga hasil estimasi regresi dapat digunakan untuk analisis lebih lanjut tanpa gangguan autokorelasi.

d. Uji Multikolinearitas

Pada tabel 4.4, hasil pengujian multikolinearitas ditunjukkan melalui nilai *tolerance* dan *variance Inflation Factor* (VIF) untuk masing-masing variabel independen. Hasil menunjukkan bahwa nilai *tolerance* untuk variabel Jumlah Penduduk, Dana Bagi Hasil (DBH), dan Total Belanja Daerah masing-masing adalah 0,568; 0,697; dan 0,601, yang semuanya lebih besar dari 0,10. Sedangkan nilai VIF untuk ketiga variabel tersebut berturut-turut sebesar 1,760; 1,434; dan 1,663, yang seluruhnya jauh di bawah batas toleransi 10.

Tabel 4.4 Uji Multikolinearitas

Coefficients ^a								
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	14,070	1,574		8,941	0,000		
	Jumlah Penduduk	-4,147E-06	0,000	-0,606	-3,397	0,019	0,568	1,760
	DBH (Rp)	-4,239E-12	0,000	-0,288	-1,789	0,134	0,697	1,434
	Total Belanja Daerah	-3,043E-12	0,000	-0,601	-3,462	0,018	0,601	1,663

a. Dependent Variable: Indeks Kesulitan sosial

Sumber: Hasil Pengolahan SPSS Versi 24

Berdasarkan hasil tersebut, dapat disimpulkan bahwa model regresi ini tidak mengalami masalah multikolinearitas. Dengan demikian, seluruh variabel independen dapat dimasukkan ke dalam model tanpa menimbulkan distorsi pada hasil estimasi regresi.

3. Uji Hipotesa

a. Uji Regresi Linear Berganda

Berdasarkan hasil pengolahan data dengan metode regresi linear berganda, diperoleh persamaan model sebagai berikut:

Tabel 4.5 Hasil Uji Regresi

Coefficients ^a					
Model	Unstandardized Coefficients	Standardized Coefficients	t	Sig.	
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	14,070	1,574		8,941	0,000
Jumlah Penduduk	-4,147E-06	0,000	-0,606	-3,397	0,019
DBH (Rp)	-4,239E-12	0,000	-0,288	-1,789	0,134
Total Belanja Daerah	-3,043E-12	0,000	-0,601	-3,462	0,018

a. Dependent Variable: Indeks Kesulitan sosial

Sumber: Hasil Pengolahan SPSS Versi 24

$$\text{IKS}_{it} = 14,070 - 4,147 \times 10^{-6} \text{JP}_{it} - 4,239 \times 10^{-12} \text{DBH}_{it} - 3,043 \times 10^{-12} \text{TBit}_{it} + \varepsilon_{it}$$

Berdasarkan hasil estimasi, nilai konstanta sebesar 14,070 menunjukkan nilai IKS ketika semua variabel independen bernilai nol secara teoritis. Setiap penambahan satu satuan pada variabel jumlah penduduk, DBH, dan total belanja daerah, ceteris paribus, akan menurunkan nilai IKS sesuai koefisiennya masing-masing. Koefisien negatif pada ketiga variabel independen mengindikasikan bahwa peningkatan jumlah penduduk, DBH, maupun belanja daerah secara umum berkontribusi pada penurunan tingkat kesulitan sosial di Kota Pekanbaru selama periode penelitian.

b. Uji Parsial (Uji T)

Uji t dilakukan untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen secara parsial. Hasil analisis menunjukkan berikut

Tabel 4.6 Hasil Uji Parsial

Coefficients ^a					
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t
		B	Std. Error	Beta	Sig.
1	(Constant)	14,070	1,574		8,941
	Jumlah Penduduk	-4,147E-06	0,000	-0,606	-3,397
	DBH (Rp)	-4,239E-12	0,000	-0,288	-1,789
	Total Belanja Daerah	-3,043E-12	0,000	-0,601	-3,462

a. Dependent Variable: Indeks Kesulitan sosial

Sumber: Hasil Pengolahan SPSS Versi 24

1. Jumlah Penduduk memiliki nilai koefisien sebesar $-4,147 \times 10^{-6}$ dengan nilai t sebesar $-3,397$ dan tingkat signifikansi 0,019. Nilai signifikansi $< 0,05$ menandakan bahwa jumlah penduduk berpengaruh negatif signifikan terhadap IKS. Artinya, bertambahnya jumlah penduduk, dalam konteks pertumbuhan ekonomi perkotaan, justru dapat menurunkan tingkat kesulitan sosial.
2. Dana Bagi Hasil (DBH) memiliki koefisien $-4,239 \times 10^{-12}$ dengan nilai t sebesar $-1,789$ dan signifikansi 0,134. Karena nilai signifikansi $> 0,05$, maka DBH tidak berpengaruh signifikan secara statistik terhadap IKS pada tingkat kepercayaan 95%.
3. Total Belanja Daerah memiliki koefisien $-3,043 \times 10^{-12}$ dengan nilai t $-3,462$ dan signifikansi 0,018. Dengan signifikansi $< 0,05$, variabel ini berpengaruh negatif signifikan terhadap IKS, sehingga peningkatan belanja daerah terbukti efektif menurunkan tingkat kesulitan sosial.

c. Uji Simultan (Uji F)

Uji simultan atau uji F digunakan untuk mengetahui pengaruh seluruh variabel independen secara bersama-sama terhadap variabel dependen. Berdasarkan hasil ANOVA, diperoleh nilai F sebesar 16,750 dengan tingkat signifikansi 0,005 ($< 0,05$). Ini menunjukkan bahwa secara simultan, jumlah penduduk, DBH, dan total belanja daerah berpengaruh signifikan terhadap Indeks Kesulitan Sosial. Dengan demikian, model regresi yang dibangun layak digunakan untuk menjelaskan variabel dependen

Tabel 4.7 Hasil Uji Simultan

ANOVA ^a					
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F
1	Regression	2,983	3	0,994	16,750
	Residual	0,297	5	0,059	
	Total	3,280	8		

a. Dependent Variable: Indeks Kesulitan sosial

b. Predictors: (Constant), Total Belanja Daerah, DBH (Rp) , Jumlah Penduduk

Sumber: Hasil Pengolahan SPSS Versi 24

d. Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi (R^2) dari model sebesar 0,910, dengan adjusted R^2 sebesar 0,855. Hal ini berarti sekitar 91% variasi Indeks Kesulitan Sosial dapat dijelaskan oleh variasi jumlah penduduk, DBH, dan total belanja daerah. Nilai R^2 yang sangat tinggi ini menunjukkan bahwa model memiliki daya jelask yang sangat baik terhadap fenomena yang diteliti, sedangkan sisanya (9%) dijelaskan oleh faktor lain di luar model.

Tabel 4.8 Hasil Uji Koefisien Determinasi

Model Summary ^b					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.954 ^a	0,910	0,855	0,24364	1,725

a. Predictors: (Constant), Total Belanja Daerah, DBH (Rp) , Jumlah Penduduk

b. Dependent Variable: Indeks Kesulitan sosial

Sumber: Hasil Pengolahan SPSS Versi 24

Secara keseluruhan, hasil pengujian ini menegaskan bahwa kebijakan fiskal daerah (khususnya optimalisasi belanja daerah) dan dinamika jumlah penduduk memiliki peran signifikan dalam menurunkan tingkat kesulitan sosial di Kota Pekanbaru. Sementara itu, Dana Bagi Hasil dari pemerintah pusat, meski arahnya negatif, masih belum cukup kuat untuk berdampak signifikan terhadap perbaikan indikator sosial secara parsial, sehingga diperlukan perbaikan tata kelola dan optimalisasi alokasi DBH ke program-program yang berdampak langsung pada masyarakat.

4.2 Pembahasan

1. Jumlah Penduduk Menurunkan Indeks Kesulitan Sosial

Temuan koefisien jumlah penduduk yang negatif dan signifikan adalah hal menarik sekaligus kontra-intuitif. Artinya, selama periode 2015–2023 di Pekanbaru, pertumbuhan jumlah penduduk justru diiringi oleh penurunan tingkat kesulitan sosial.

Pertama, periode ini bertepatan dengan pertumbuhan ekonomi Pekanbaru yang cukup tinggi. Misalnya, pada 2016, Pekanbaru mencatat laju pertumbuhan ekonomi tertinggi di Provinsi Riau sebesar 5,79%, melebihi rata-rata provinsi. Pertumbuhan ekonomi yang kuat mampu menyerap tenaga kerja baru dan meningkatkan pendapatan per kapita, sehingga dampak negatif penambahan penduduk terhadap kesejahteraan dapat terimbangi atau bahkan terbalik. Efek skala ekonomi perkotaan mungkin terjadi: populasi yang lebih banyak mendorong konsumsi dan aktivitas ekonomi yang lebih tinggi, yang bila dikelola dengan baik, meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Kedua, pertumbuhan penduduk Pekanbaru sebagian besar berasal dari migrasi tenaga kerja terampil dan ekspansi wilayah urban. Pekanbaru sebagai kota dagang dan jasa menarik pendatang yang mencari peluang usaha dan pekerjaan, sehingga populasi meningkat bersamaan dengan produktivitas ekonomi. Berbeda dengan daerah miskin yang pertumbuhan penduduknya didominasi kelahiran tinggi pada keluarga miskin, pertumbuhan penduduk di kota bisa menjadi indikator urban *growth* positif. Urbanisasi sering dikaitkan dengan penurunan kemiskinan absolut karena penduduk desa miskin pindah ke kota dan mendapat peluang pendapatan lebih baik, meskipun muncullah kemiskinan relatif baru di kota. Data BPS menunjukkan angka kemiskinan Pekanbaru turun tipis dalam sepuluh tahun terakhir meskipun penduduk naik. Antara 2015–2019, kemiskinan turun dari 3,27% menjadi 2,98%. Pandemi 2020 menaikkan angka menjadi 3,5%, namun turun lagi ke 3,16% pada 2023. Ini mengindikasikan penduduk baru (migran) justru tidak menambah beban sosial, melainkan terserap dalam ekonomi kota.

Ketiga, kebijakan keluarga berencana dan pendidikan yang relatif berhasil mungkin menekan dampak pertumbuhan penduduk. Sebagai kota dengan fasilitas kesehatan dan pendidikan cukup baik, Pekanbaru mungkin mengalami transisi demografi lebih cepat: angka kelahiran per wanita turun, sehingga pertambahan penduduk lebih karena migrasi selektif usia produktif dibanding ledakan kelahiran. Migran usia produktif cenderung berpendidikan dan memiliki keahlian lebih baik, sehingga berkontribusi positif pada ekonomi lokal (*fenomena human capital migration*). Oleh karena itu, hubungan negatif antara JP dan IKS lebih mencerminkan korelasi terbalik akibat pertumbuhan ekonomi dan komposisi penduduk, bukan bahwa penduduk banyak langsung menurunkan kesulitan sosial. Temuan ini sejalan dengan studi Nabi et al. (2020) yang menunjukkan bahwa di beberapa negara, pertumbuhan populasi tidak memperburuk kemiskinan berkat peningkatan produktivitas.

Namun, perlu kehati-hatian karena temuan ini bisa spesifik periode dan kontekstual. Ada indikasi kuat *collinearity* antara tren JP dan waktu (tahun), yang juga merefleksikan perbaikan ekonomi. Analisis parsial menunjukkan JP menjelaskan sekitar 10% variasi IKS ketika variabel lain dikontrol. Secara kebijakan, pemerintah tetap harus waspada: jika laju penduduk melebihi kemampuan penciptaan lapangan kerja, dampak negatif yang umum dalam literatur bisa muncul kembali. Implikasi penting adalah pengendalian laju penduduk melalui program kependudukan (Keluarga Berencana) tetap krusial, disertai penguatan kapasitas ekonomi agar bonus demografi di Pekanbaru dapat terserap optimal.

2. Dampak Dana Bagi Hasil yang Tidak Signifikan

Koefisien DBH negatif namun tidak signifikan menunjukkan bahwa peningkatan DBH mungkin berkontribusi menurunkan IKS, tapi kontribusinya belum meyakinkan. Secara arah, negatifnya sesuai ekspektasi: DBH naik → APBD bertambah → pemerintah daerah memiliki ruang fiskal lebih untuk program sosial → IKS turun.

Namun, mengapa secara statistik efeknya lemah? Pertama, fluktuasi DBH relatif kecil dibanding variabel lain. Selama 2015–2023, DBH Pekanbaru berkisar Rp180–300 miliar, dengan pertumbuhan tidak linear (turun-naik). Variasi ini mungkin tidak selaras dengan tren IKS yang turun konsisten, sehingga hubungan DBH-IKS menjadi *noisy*. Kedua, kualitas penggunaan DBH perlu dicermati. Pekanbaru memperoleh DBH besar (karena Riau kaya SDA), namun porsi DBH hanya sekitar 15–20% dari total pendapatan. Tambahan DBH marginal mungkin dialokasikan ke belanja rutin atau proyek non-sosial, sementara belanja sosial bergantung pada sumber lain (PAD atau DAU). Jika DBH tidak difokuskan untuk pengentasan sosial, efeknya ke IKS minimal. Ini konsisten dengan catatan Putra (2017) bahwa transfer tanpa syarat (*unconditional transfer*) kadang dipakai untuk belanja *non pro-poor*.

Ketiga, durasi penelitian (9 tahun) mungkin terlalu singkat untuk melihat efek DBH penuh. Studi Ina & Hudang (2024) di NTT menemukan efek signifikan karena karakteristik daerah berbeda, mengandalkan transfer pusat untuk layanan dasar. Pekanbaru dengan PAD besar dan belanja infrastruktur ambisius mungkin menyerap DBH di proyek infrastruktur jangka panjang yang efek sosialnya tidak instan. Selain itu, DBH sering tidak *earmarked*, sehingga tergantung prioritas daerah tiap tahun. Jika fokus pada infrastruktur keras, efek sosial tidak langsung terlihat.

Dari studi lain, Suhyanto et al. (2021) menemukan DAU paling berdampak pada penurunan kemiskinan dan peningkatan HDI, sementara Putra (2017) menilai efektivitas transfer rendah dibanding harapan. Di Pekanbaru, hasil menunjukkan DBH negatif terhadap IKS (arah benar) namun efek kecil.

Implikasi kebijakan membuat Pemkot Pekanbaru perlu memastikan DBH digunakan untuk program yang langsung menurunkan kesulitan sosial, misal pendidikan untuk warga miskin, layanan kesehatan gratis, perbaikan lingkungan permukiman kumuh. Apabila DBH hanya menjadi sumber belanja birokrasi, pengurangan IKS tidak optimal. Transparansi dan pengawasan pemanfaatan DBH harus ditingkatkan. Pemerintah pusat juga dapat didorong untuk memperhitungkan jumlah penduduk miskin dalam formula DBH agar daerah terdorong memanfaatkan DBH untuk menurunkan kemiskinan demi mendapat alokasi lebih besar (mekanisme insentif).

3. Signifikansi Pengaruh Total Belanja Daerah

Hasil penelitian menunjukkan Total Belanja Daerah berpengaruh negatif signifikan terhadap IKS, menjadikannya instrumen krusial. Koefisien $-3,043 \times 10^{-12}$ mengindikasikan tambahan belanja Rp1 triliun dapat menurunkan IKS sekitar 3 poin, dimana IKS rata-rata sekitar 5 poin. Ini menandakan elastisitas cukup besar: belanja APBD yang efektif dapat menurunkan masalah sosial secara nyata. Selama 2015–2023, Belanja Pekanbaru naik hampir 40%; model memprediksi penurunan IKS sekitar 1 poin, sejalan dengan realisasi.

Temuan ini konsisten dengan literatur Anggun & Sari (2024) yang menemukan belanja daerah signifikan menurunkan kemiskinan di wilayah perbatasan, selain itu Firdaus & Beik (2013) juga mendukung belanja publik untuk pengentasan kemiskinan secara nasional. Efektivitas belanja Pemkot Pekanbaru patut diapresiasi, terutama di sektor sosial. Contohnya, belanja bidang kesehatan naik untuk program jaminan kesehatan daerah (gratis PBI BPJS bagi warga miskin), belanja pendidikan untuk beasiswa dan operasional sekolah, serta belanja infrastruktur fokus pada penyediaan air bersih dan jalan lingkungan di daerah pinggiran.

Dampak kebijakan ini tercermin dari indikator sosial yang membaik yaitu akses air bersih meningkat, jumlah keluarga di rumah tidak layak huni menurun (laporan Bappeda Pekanbaru). Nurias et al. (2023) menegaskan belanja kesehatan dan pendidikan signifikan menurunkan kemiskinan, sedangkan belanja bantuan sosial perlu dikombinasikan dengan program lain. Pekanbaru tampaknya mengombinasikan belanja sosial (pendidikan-kesehatan) dan belanja ekonomi (infrastruktur pertumbuhan), sehingga kemiskinan dan pengangguran turun, berkontribusi pada penurunan IKS.

Meski demikian, efisiensi belanja harus dijaga. Tingginya belanja bisa juga disebabkan oleh biaya proyek mahal atau inefisiensi. Idealnya, belanja marginal berikutnya diarahkan pada program *cost-effective* yang mengurangi kesulitan sosial, misal pengentasan kemiskinan ekstrem (0,5% penduduk masih miskin ekstrem), pemberdayaan UMKM miskin, peningkatan keterampilan angkatan kerja muda untuk mencegah pengangguran.

Implikasi kebijakan yaitu Pemkot perlu mempertahankan alokasi anggaran memadai di sektor pro-rakyat (kesehatan, pendidikan, perlindungan sosial, penanggulangan kemiskinan), minimal sesuai amanat UU (20% pendidikan, 10% kesehatan). Evaluasi *outcome* dari belanja tersebut perlu terus dilakukan agar nilai uang optimal (*value for money*). Secara nasional, hasil ini mendukung argumentasi bahwa menambah belanja publik daerah perkotaan dapat menurunkan masalah sosial jika diarahkan tepat. Ini menjadi dasar advokasi kebijakan fiskal ekspansif selektif di tengah tekanan efisiensi anggaran.

4. Kekuatan dan Keterbatasan Model

Nilai *R-squared* tinggi (91%) menandakan model dengan JP, DBH, dan TB mampu menjelaskan sebagian besar variasi IKS. Ini mengindikasikan ketiga faktor tersebut fundamental bagi dinamika IKS di Pekanbaru. Sisanya (~9%) mungkin dijelaskan faktor lain yang tidak dimasukkan dalam model, seperti tingkat pengangguran, inflasi, atau *dummy* pandemi. Uji normalitas menunjukkan residu terdistribusi normal, mendukung validitas inferensi. Namun, keterbatasan penelitian ini perlu diperhatikan:

- Jumlah observasi yang terbatas, yaitu hanya selama sembilan tahun, dapat mengurangi kekuatan uji statistik dan meningkatkan risiko overfitting dalam model. Oleh karena itu, generalisasi temuan dari penelitian ini perlu dilakukan dengan kehati-hatian
- Fokus pada satu kota, sehingga kesimpulan konteks-spesifik. Misal, efek negatif jumlah penduduk mungkin tidak berlaku di kota lain dengan kondisi ekonomi berbeda.
- Penelitian ini tidak memasukkan variabel kontrol tambahan seperti tingkat pengangguran, pertumbuhan ekonomi, dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), yang secara teoritis memiliki pengaruh terhadap Indeks Kepuasan Sosial (IKS). Penghilangan variabel-variabel tersebut dilakukan untuk menjaga kesederhanaan model dan menghindari masalah multikolinearitas. Namun, keputusan ini tetap menimbulkan risiko bias spesifikasi. Sebagai contoh, pertumbuhan ekonomi Kota Pekanbaru yang relatif tinggi kemungkinan memiliki keterkaitan erat dengan tingkat belanja dan IKS. Dengan tidak dimasukkannya variabel ini, pengaruh belanja terhadap IKS dapat terestimasi secara berlebihan (*overestimated*), karena sebagian dari efek pertumbuhan ekonomi ikut terefleksikan dalam variabel belanja.

Secara keseluruhan, temuan ini konsisten dengan literatur bahwa transfer fiskal dan belanja daerah adalah instrumen ampuh menurunkan masalah sosial jika dimanfaatkan dengan baik. Temuan tak terduga mengenai hubungan demografi dan sosial-ekonomi mengajarkan bahwa hubungan ini tidak linear dan sangat tergantung konteks. Pekanbaru berhasil mengubah potensi beban demografis menjadi kekuatan

pembangunan—contoh yang patut ditiru dengan meningkatkan iklim investasi dan peluang kerja. Studi ini diharapkan memperkaya diskusi tentang peran pemerintah daerah dalam menangani isu sosial di era desentralisasi fiskal.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa jumlah penduduk dan total belanja daerah memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap Indeks Kesulitan Sosial (IKS) di Kota Pekanbaru selama periode 2015–2023, yang berarti pertumbuhan penduduk dan peningkatan belanja daerah, bila disertai dengan pertumbuhan ekonomi yang baik dan kebijakan fiskal yang efektif, mampu menurunkan tingkat kesulitan sosial masyarakat. Sementara itu, Dana Bagi Hasil (DBH) berpengaruh negatif namun tidak signifikan secara statistik terhadap IKS, mengindikasikan bahwa alokasi DBH yang diterima belum sepenuhnya dioptimalkan untuk mengurangi permasalahan sosial secara langsung. Secara simultan, ketiga variabel tersebut mampu menjelaskan sebagian besar variasi IKS di Kota Pekanbaru, dengan nilai R^2 sebesar 91%, yang menandakan model analisis memiliki daya jelask yang sangat baik terhadap dinamika sosial ekonomi di wilayah penelitian.

5.2 Saran

Pemerintah Kota Pekanbaru disarankan untuk meningkatkan efektivitas pemanfaatan Dana Bagi Hasil melalui alokasi yang lebih spesifik pada program-program sosial yang berdampak langsung terhadap penurunan kesulitan sosial, serta memastikan belanja daerah tetap difokuskan pada sektor prioritas seperti pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial secara efisien dan tepat sasaran. Selain itu, penguatan kebijakan keluarga berencana serta optimalisasi bonus demografi melalui penciptaan lapangan kerja dan pemberdayaan ekonomi masyarakat perlu terus diupayakan agar pertumbuhan penduduk benar-benar menjadi aset pembangunan dan bukan beban sosial.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustina, E., Syechalad, M. N., & Hamzah, A. (2018). Pengaruh jumlah penduduk, tingkat pengangguran, dan tingkat pendidikan terhadap kemiskinan di Provinsi Aceh. *Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam*, 4(2): 265–283.
- Anggraeni, S. & Haryanto, T. (2020). Pengaruh belanja daerah dan pertumbuhan ekonomi terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan*, 28(2): 123–134.
- Anggun, A. & Sari, N. I. 2024. Pengaruh realisasi belanja daerah terhadap tingkat kemiskinan di daerah perbatasan Kalimantan Barat 2013–2022. *Ekodestinas: Jurnal Ekonomi, Bisnis, dan Pariwisata*, 2(1): 45–58.
- Becker, G. S. (1993). *Human Capital: A Theoretical and Empirical Analysis, with Special Reference to Education* (3rd ed.). The University of Chicago Press.
- Bloom, D. E., & Canning, D. (2004). Global demographic change: Dimensions and economic significance. *NBER Working Paper No. 10817*, National Bureau of Economic Research, Cambridge, MA.
- Chariza, P. & Yefriza, Y. (2025). Pengaruh belanja pemerintah daerah, pengangguran, dan pertumbuhan penduduk terhadap kemiskinan di Bengkulu. *Jurnal Ekonomi dan Ekonomi Syariah (JESYA)*, 8(1): 10–25.
- Darmawan, I. G. N. (2020). Pengaruh belanja langsung dan tidak langsung terhadap kemiskinan di Provinsi Aceh. *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik*, 11(2): 97–110.
- Fadlillah, N., Dewi, A. S., & Sukiman. 2016. Analisis pengaruh pendapatan per kapita, tingkat pengangguran, IPM, dan pertumbuhan penduduk terhadap kemiskinan di Jawa Tengah 2009–2013. *Jurnal Pembangunan Ekonomi Wilayah*, 11(1): 18–26.
- Fauzi, R. N., Febriani, R. K., & Desmawan, D. (2022). Pengaruh laju pertumbuhan penduduk terhadap kemiskinan di Indonesia. *EBISMEN: Jurnal Ekonomi, Bisnis, dan Manajemen*, 1(1): 118–122.
- Firdaus, M. & Beik, I. S. 2013. Pengaruh belanja daerah terhadap penanggulangan kemiskinan dan pengangguran di Indonesia. *Buletin Ekonomi Moneter dan Perbankan*, 16(2): 129–156.
- Ghozali, I. 2018. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 25*. Badan Penerbit UNDIP, Semarang.
- Halim, A., Rahayu, D., & Muzdalifah. (2022). Analisis pengaruh pengeluaran pemerintah daerah terhadap indeks pembangunan manusia (studi kasus 2015–2019). *Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia*, 7(8): 13–27.
- Hasballah, A. (2021). Dampak pertumbuhan penduduk terhadap pengangguran di Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik*, 12(2): 55–66.
- Ina, Y. T. & Hudang, A. K. (2024). Pengaruh dana bagi hasil terhadap indeks pembangunan manusia di NTT. *Jurnal Ilmiah Global Education*, 5(2): 1234–1245.
- Malthus, T. R. (1798). *An Essay on the Principle of Population*. J. Johnson, London.
- Musgrave, R. A. (1959). *The Theory of Public Finance: A Study in Public Economy*. McGraw-Hill Book Company, New York.

Hamid-Nurfitriani-Silkfan-Adiman, Pengaruh Jumlah Penduduk, Dana Bagi Hasil, Dan Total Belanja Daerah Terhadap Indeks Kesulitan Sosial Di Kota Pekanbaru

- Nabi, M. S., Ali, S., Amin, A., & Ahmad, F. (2020). Population growth and poverty: Empirical evidence from developing countries. *Journal of Population and Social Studies*, 28(3): 250–263.
- Nurias, N., Johari, S. M., Muljarijadi, B., & Wardhana, A. (2023). Reducing the provincial poverty rate in Indonesia: The impact of local government expenditure. *Jurnal Ekonomi & Studi Pembangunan*, 24(2): 128–141.
- Oates, W. E. (1972). *Fiscal Federalism*. Harcourt Brace Jovanovich, New York.
- Putra, H. S. (2017). The linkage of intergovernmental transfer and poverty in Indonesia. *Jurnal Bina Praja*, 9(1): 29–40.
- Suhyanto, O., Juanda, B., Fauzi, A., & Rustiadi, E. (2021). The effect of transfer funds on development performance in West Java. *International Journal of Economics and Financial Issues*, 11(3): 22–27.
- UNDP. (2010). *Human Development Report 2010: The Real Wealth of Nations—Pathways to Human Development*. United Nations Development Programme, New York
- Williantara, B. A. & Budiasih, I. G. A. N. (2016). Pengaruh dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dan dana bagi hasil terhadap indeks pembangunan manusia. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 14(3): 1902–1929.